

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang baru terlepas dari rezim otoriter, tentunya banyak sekali persoalan pelik yang muncul. Salah satunya adalah persoalan peranan militer dalam ranah politik. Semasa Orde Baru, Presiden, Gubernur, Bupati, camat hingga kepala desa atau lurah sebagian besar adalah dari kalangan militer yang aktif atau yang telah purnawirawan. Sebagai aktor dominan, militer menguasai hampir seluruh proses penyelenggaraan negara, dari bidang politik, ekonomi, sosial dan lain-lainnya. Proses hegemoni ini pada akhirnya melahirkan sistem yang otoriter.

Iswandi (1986:61) menyebutkan, sejarah kekuasaan Orde Baru adalah sejarah neofasisme (militer), yaitu suatu pemerintahan yang dibangun dengan cara mengandalkan irasionalisme, irasionalisme, nasionalisme dan korporatisme. Ciri dari pemerintahan neofasisme militer ini adalah mengandalkan kekuatan militer untuk menghancurkan organisasi-organisasi massa (kekuatan sipil) dan menghilangkan semua gerakan militan.

Bibit-bibitnya (neo-fasisme) menurut Mashudi Noorsalim dan Curie Maharani (2004;180) telah muncul sejak masa demokrasi terpimpin, dan diaplikasikan 'nyaris' sempurna pada masa Orde Baru. Meskipun ketetapan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai kekuatan sosial baru dikukuhkan pada 1982, yaitu melalui UU No.20/1982, namun prakteknya peran sosial-politik (sospol) TNI semakin membesar. Peran sosial TNI ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan 'Dwifungsi ABRI/TNI'

Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto merupakan sebuah rezim yang telah dikuasai oleh militer secara total. Rezim otoriterian Orde Baru tersebut ditopang oleh kekuatan militer dengan menggunakan instrumentasi doktrin dwifungsi, Golkar dan penguasaan atas jalur birokrasi. Militer masuk ke dunia politik dengan mendapatkan 100 kursi legislatif tanpa melalui mekanisme Pemilu.

Syaukani, Affan Gaffar, dan Ryas Rasyid (2004:124-125) menjelaskan, kehadiran Jenderal Soeharto dengan Orde Baru yang syarat dengan dominasi tentara atau militer dalam kehidupan politik nasional membawa dampak yang sangat luas bagi keberadaan otoriterianisme. Politik hanya menjadi domain dari sekelompok kecil orang yang berada di sekitar pusat kekuasaan di Jakarta. Bahkan oleh mendiang Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud dimunculkan slogan "Politik No, Pembangunan Yes." Demokrasi kemudian terpendam jauh kedalam lumpur kehidupan politik dan digantikan oleh otoriterianisme dengan segala macam implikasinya. Sentralisasi kekuasaan mendapat tempat yang sangat kuat dalam pemerintahan Soeharto. Hal ini berkaitan erat pula dengan hakekat pemahaman kekuasaan dari Soeharto yang mempunyai latar belakang militer yang sangat kuat dan ditopang pilar oleh budaya politik "Mataram" yang hierarkis dan sentralistik.

Pengaruh politik angkatan bersenjata di semua negara sangat luas. Militer merupakan pembang kedauletan negara dan penahan utama bagi kemungkinan serangan terhadap negara, baik dari luar maupun dalam. Militer menjadi tulang punggung rezim Soeharto selama 32 tahun. Dalam masa-masa awal Orde baru dapat dikatakan bahwa Soeharto pemimpin rezim militer yang memiliki posisi kunci di dalam pemerintahan dan

Militer adalah sebuah organisasi yang sangat ketat, hierarkis, dan birokratis. Dalam organisasi kemiliteran perintah dari seorang komandan merupakan perintah yang harus dijalankan oleh para bawahannya. Setiap bawahan mempunyai sifat ketundukan dan loyalitas yang tinggi kepada atasan. Perintah atasan merupakan sesuatu yang "sakral" dalam institusi ini. Militer cenderung memainkan peran penting yang melampaui proporsi di banyak negara berkembang karena beberapa alasan:

1. Eksistensinya kelompok berkuasa dalam masyarakat yang mengancam militer
2. Persepsi korps perwira tentang kebutuhan mencapai peningkatan kekuasaan militer di masyarakat
3. Kelemahan-kelemahan kepemimpinan sipil yang menyediakan peluang bagi militer untuk campur tangan di dalam perpolitikan nasional.

Menurut Eric A. Nordlinger (1990:63), struktur internal kelompok politik – yaitu pola-pola hubungan para anggota, peranan dan unit – mungkin mempengaruhi sikap politik para anggota, tanggapan mereka terhadap prioritas kelompok, dan kemampuan kelompok untuk mendominasi atau bersaing dengan kelompok lain. Sebagai satu potensi atau kelompok politik yang sebenarnya, sifat struktur militer yang paling menonjol adalah sifat birokrasi. Sifat tersebut berpengaruh sekali atas sikap dan tingkah laku perwira, baik terhadap keputusan untuk melakukan campur tangan maupun gaya pemerintahan pretorian. Ciri-ciri utama di dalam birokrasi yang ideal termasuk penggunaan kriteria pencapaian di dalam menentukan kenaikan pangkat, keyakinan kuat kepada prinsip yang rasional di dalam proses membuat keputusan, dan arahan pejabat instansi tertentu dijalankan secara hierarkis dan sangat ketat. Sehingga hanya organisasi

militer mirip benar dengan model birokratis seperti ini. Citra militer sebagai pembuat keputusan yang cakap dan rasional telah membantu.

Keterlibatan militer dalam ranah politik di Indonesia dimulai sejak bangsa ini memproklamkan kemerdekaan tahun 1945. Najib Azca (1998), menyebutkan peranan militer dalam politik di Indonesia, dari aksi menuju hegemoni dapat dibagi menjadi tiga periode. *Yang pertama* tahun 1945-1955, yakni yang disebut periode Dwifungsi ABRI dari aksi menuju ke akomodasi. Aksi Dwifungsi ABRI dimulai dari awal masa perang kemerdekaan ; Akomodasi Dwifungsi ABRI dimulai sejak dimulainya era Demokrasi Terpimpin ketika tentara di Akomodasi dalam sistem politik. *Yang kedua* tahun 1955-1966, dari akomodasi menuju dominasi. Periode ini merupakan peralihan menuju dominasi sosial politik oleh ABRI yang ditandai dengan munculnya Orde Baru. *Yang ketiga* adalah tahun 1966-1990-an, yakni dari dominasi menuju hegemoni.

Kusnanto Anggoro (1999:28) menguraikan, sejarah, doktrin, dan garis komando menyebabkan militer menjadi kekuatan yang cenderung reaktif, atau bahkan konservatif, dan tidak begitu akomodatif terhadap perubahan yang dituntut kalangan sipil. Tidak mudah mengubahnya, terutama karena memang terdapat hubungan erat antara bentuk-bentuk dan derajat keterlibatan militer dalam politik. Pengalaman transisi demokratisasi di negara Amerika Latin menunjukkan bahwa demokratisasi lebih dari sekedar negoisasi antara sipil-militer maupun kesadaran di kalangan militer tentang gagasan demokrasi dan demokratisasi. Hubungan yang serasi antara sipil dan militer lebih mudah dibangun di negara-negara yang menghadapi ancaman luar yang jelas, ketika militer harus memusatkan perhatiannya pada upaya bela negara, dan kemampuan mereka untuk itu sangat tergantung pada keputusan politik sipil. Selain itu, aksi politik sipil cenderung

kohesif dan oleh karenanya membuka peluang bagi kalangan ini untuk menerapkan mekanisme pengendalian obyektif" (*objektif control mechanism*) terhadap militer, misalnya dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada kalangan militer untuk menentukan masalah-masalah pertahanan.

Dengan 100 kursi yang diperoleh fraksi ABRI ditambah dengan kekuatan politik Golkar yang selalu keluar sebagai pemenang dominan setiap kali pemilu dan penguasaan militer atas jalur birokrasi membuat militer menguasai negara dengan sempurna. Militer memiliki pengaruh hebat dan sangat disegani dalam penentuan kebijakan negara. Militer dengan mudah melakukan dominasi dan intervensi politik yang melemahkan peran sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Supremasi sipil atas militer (*Civilian supremacy upon the military*) sebagai penanda mutlak demokratisasi tidak pernah terjadi. Sebaliknya, yakni supremasi militer atas sipil. Hubungan Sipil Militer terbangun secara hierarkhis subordinat-superordinat, inferioritas-superioritas dan sipil diperintah oleh militer dengan otoriter dan penuh teror.

Selama orde Baru berkuasa, militer tampil menjadi penguasa dan memainkan peran yang hegemonik di dalam segala sendi-sendi kehidupan. Menurut Cholish (2002) dan (Mashudi N dan Curie M. S (2004:182) menyebutkan, militer menempati jabatan-jabatan politis seperti menteri, gubernur, bupati, anggota Golkar, dan duduk mewakili dirinya di DPR. Misalnya, pada 1996, anggota militer yang menjadi menteri sebanyak 12 orang dari 27 anggota kabinet dan 11 anggota militer menempati jabatan strategis di departemen-departemen urusan sipil. Ditingkat daerah, pada 1968, sebanyak 68% gubernur dijabat oleh anggota militer, dan 92% pada 1970. sementara, pada 1968 terdapat sebanyak 50% bupati di Indonesia berasal dari anggota bupati di

Indonesia berasal dari anggota militer. Kemudian pada 1973, jumlah militer yang menjadi menteri sebanyak 13 orang; sebanyak 400 anggota militer dikaryakan di tingkat pusat, dan 22 dari 27 gubernur di Indonesia di jabat oleh militer. Hingga 1982, sebanyak 9% jabatan-jabatan strategis di tingkat pusat yang berkaitan dengan persoalan sipil dijabat oleh anggota militer.

Moh. Mahfud MD (1999) menyebutkan bahwa, Orde Lama dan Orde Baru dalam abagan politik di Indonesia sama tidak demokratisnya. Kedua rezim ini sama otoriterinya. Lebih lanjut ia menyatakan, menyamakan begitu saja otoriterianisme yang ada pada keduanya adalah kurang fair, karena otoriterisme pada kedua periode tersebut memang mengandung perbedaan-perbedaan. Perbedaan itu antara lain:

- a. Pada era Orde Lama tidak ada sistem kepartaian, sedangkan pada era Orde Baru yang hidup adalah sistem kepartaian hegemonik.
- b. Tumpuan kekuatan orde lama adalah Soekarno sebagai Presiden, sedangkan tumpuan kekuatan Orde Baru adalah Presiden Soeharto, ABRI, GOLKAR, dan Birokrasi.
- c. Jalan yang ditempuh Orde Lama adalah inskonstitusional, sedangkan Orde Baru memilih justifikasi melalui cara-cara konstitusional sehingga perjalanan menuju otoriteriannya memang didasarkan pada peraturan yang secara "formal" ada atau dibuat.

Menurut Mas'ood (1989) dalam Azca (1998:88), ciri-ciri struktural sistem politik Orde Baru menyerupai ciri-ciri model "otoriterisme-birokratik" sebagaimana yang kemukakan oleh Guillermo O'donnell dan model "korporatisme-negara" yang kemukakan oleh Phillipe Schmitter dan Richard Crook, model-model tersebut

Rezim otoriter birokratik mempunyai ciri-ciri:

1. Pemerintah dipimpin oleh militer sebagai suatu lembaga, bekerjasama dengan para "teknokrat" sipil,
2. Ia didukung oleh para "wiraswastawan" oligopolistik, yang bersama negara bekerja sama dengan masyarakat bisnis internasional,
3. Proses pembuatan kebijaksanaannya didominasi oleh pendekatan birokratik-teknokratik, dengan demikian menghindari proses tawar-menawar yang lama diantara berbagai kelompok kepentingan,
4. Massa didemobilisasikan, dan
5. Pemerintah menggunakan berbagai tindakan represif untuk mengendalikan oposisi.

Sesungguhnya, ada beberapa hal yang mempengaruhi kelahiran dari rezim otoriter, terbentuknya pemerintahan otoriter bisa terjadi kapan saja, yang paling sering terjadi adalah akibat kudeta militer terhadap pemerintahan sipil yang dianggap gagal. G.I. Mirsky (1981:332) dalam Ivan A. Hadar (2004:36) menunjukkan, ada beberapa faktor penyebab 'hilangnya legitimasi' pemerintahan sipil:

- Berlarut-larutnya mekanisme dan *njlimet*-nya birokrasi yang korup dan jauh dari kebutuhan riil masyarakat sipil;
- Berkecamuknya konflik etnik dan religius dalam masyarakat yang tidak bisa diatasi secara memuaskan oleh pemerintah;
- Persetujuan dengan Negara-negara tetangga yang disebabkan oleh masalah

Guillermo A. Donnell dalam James M. Malloy (1977:47) menjelaskan Tipe baru Negara Otoriter Birokratik ternyata mengalami perluasan (*expansion*) yang lebih kuat, yang tidak dapat diduga dalam perkembangan berikutnya dalam teori Negara ini.

- 1) Negara OB secara lebih insentif dan komprehensif memperluas bidang aktifitas kontrolnya dan mengadakan penanganan secara langsung.
- 2) Negara OB secara dinamis dapat melaju pertumbuhannya dibandingkan dengan kekuatan masyarakat sipil secara keseluruhan.
- 3) Negara OB melakukan penetrasi dengan cara mensubordinasikan berbagai wilayah "private" dari masyarakat keseluruhan.
- 4) Negara OB melakukan politik yang represif dalam perluasan dan kemampuan koersif yang dijalankan.
- 5) Bentuk Negara OB yang birokratis dalam formalisasi dan diferensiasi dari strukturnya.
- 6) Keterkaitan Negara OB dalam modal dan hutang asing, yang sangat diperlukan dalam ekspansi industrialisasi.

Semasa Orde Baru pemerintah melakukan kebijakan untuk mendorong laju perekonomian. Untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi pemerintah kemudian mengundang investor luar negeri dalam bentuk investasi. Pada 1 Januari 1967 Undang-undang Penanaman Modal Asing (UU PMA), dan pada tanggal 3 Juli 1968 Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN) di ratifikasi. Investor asing kemudian berdatangan, dan IMF mengucurkan dana dalam bentuk hutang untuk modal pembangunan. Satu hal yang perlu diasadari adalah, para investor itu meminta jaminan keamanan akan investasinya, serta uang tunai yang masuk kepada Indonesia. Negara

harus menciptakan dan menjamin stabilitas keamanan ekonomi-politik. Dengan bantuan militer, dan teknokrat sipil Negara kemudian mejadi represif dan otoriter kepada masyarakatnya sendiri.

Babagan sejarah baru kehidupan politik yang demokratis di Indonesia sendiri baru dimulai saat bulan Mei 1998 yang lalu, saat rezim otoriter dibawah kepemimpinan Soeharto tumbang. Sebenarnya, Indonesia pernah mengalami kehidupan politik yang sangat demokratis, yakni saat diselenggarakan Pemilu pada tahun 1955. Namun akibat dari instabilitas politik akibat konflik partai politik dan agresi militer Belanda yang mengakibatkan jatuh-bangunnya kabinet (kabinet Amir Syarifudin misalnya), Soekarno kemudian memilih sistem presidensial sebagai jawaban atas solusi konflik yang berlarut.

Menurut Harold Crouch (2002:91) prakondisi yang menentukan runtuhnya rezim Soeharto adalah krisis moneter Asia yang menyebar dari Thailand di paruh kedua tahun 1997 menentukan kejatuhan rezim Soeharto. Namun, penderitaan akibat krisis itu tidak sama di tiap Negara. Penyebab kegagalan pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis tersebut secara luas ditudingkan pada struktur Negara yang membuat Indonesia tidak mampu merespon tekanan-tekanan rakyat agar reformasi dilakukan. Di antara krisis dan tekanan rakyat, Presiden Soeharto sendiri justru tampak lebih berupaya melindungi hak istimewa keluarganya dan jaringan patronase yang menjadai landasan rezimnya daripada menyodorkan langkah-langkah untuk membatasi keruntuhan ekonomi akibat krisis tersebut.

Tuntutan reformasi sistem pemerintahan dan sistem politik semakin kejang seiring jatuhnya rezim ini. Salah satu tuntutan yang pokok dari gerakan reformasi adalah militerisasi dengan satu slogan "kembali ke jalan lurus".

lari anggapan bahwa ABRI (TNI saat ini) adalah penghambat bagi lahirnya demokrasi. Watak dan sifatnya yang komandoistik dalam hierarkis militer melahirkan karakter yang anti terhadap tumbuh berkembangnya demokrasi.

Seiring dengan demokratisasi di Indonesia tuntutan reformasi militer-pun semakin kuat. Untuk merespon tuntutan reformasi Markas Besar TNI mengeluarkan konsep baru atau paradigma baru, yakni redefenisi, reposisi, dan reaktualisasi peran militer dalam kehidupan berbangsa. Paradigma baru tersebut adalah militer tidak selalu didepan, tidak lagi menduduki tetapi mempengaruhi, tidak lagi mempengaruhi secara langsung, tetapi tidak langsung, dan siap membagi peran dengan sipil dalam pengambilan policy. Klaim politik militer tidak lagi sebagai stabilisator dan dinamisator. Untuk menindaklanjuti ini misalnya, Markas Besar TNI pada tahun 1999 menghapus jabatan Kepala Staf Sosial Politik dan mengubahnya menjadi Kepala Staf Teritorial. Selain itu juga adanya pemisahan antara TNI dan Polri yang dulunya satu induk/institusi ABRI.

Meski TNI telah mereformasi diri banyak kalangan yang masih pesimis. Reformasi internal TNI-POLRI dianggap sekedar pemanis perjalanan transisi demokrasi di Indonesia, dan tidak menyentuh substansi persoalan, yakni militer sebagai subordinatnya sipil sebagai perwujudan supremasi sipil.

Demiliterisasi atau penarikan diri dari panggung politik sangat tergantung pada lamanya rezim berkuasa (rezim militer), tingkat keterlibatan militer dalam pemerintahan, konsolidasi dan lain sebagainya. Masa transisi demokrasi tidak selalu berjalan dengan mulus seperti yang kita harapkan. Fase transisi membawa dua kemungkinan, yakni kembali pada otoritarianisme atau menuju pada tatanan yang lebih demokratis. Untuk menjaga jalannya proses demokratisasi semua kekuatan harus dikonsolidasikan

(konsolidasi demokrasi). Demiliterisasi merupakan pengeluaran militer dari peran-peran non-militer dan meletakkan peran militer dalam bidang pertahanan dan keamanan semata. Demiliterisasi akan mengakhiri dominasi dan intervensi militer dalam politik, mengakhiri rezim otoritarian yang didominasi militer dan menetapkan rezim demokratis di bawah supremasi sipil.

Proses demiliterisasi Negara sendiri dipengaruhi atau tergantung pada dua faktor utama. *Pertama*, dari diri militer yakni kesediaan militer untuk menyerahkan kekuasaannya, kemampuan militer untuk mempertahankan kekuasaannya dan sebagainya. *Yang kedua* dari sipil, yakni dari sipil yang meliputi strategi demiliterisasi yang digunakan sipil, gerakan-gerakan oposisi yang dilakukan sipil, kapasitas dan kapabilitas pemimpin sipil dan sebagainya.

Demokrasi merupakan sistem politik yang dianggap banyak kalangan sebagai sistem politik yang mampu bertahan hingga kini. Usia demokrasi sendiri hampir bisa dibilang sama tuanya dengan usia peradaban manusia. Namun hingga kini demokrasi dianggap resep yang paling bagus untuk menyelesaikan persoalan ketidakadilan, yakni sistem yang dianggap mampu mengatasi hantaman krisis, baik ekonomi, politik, sosial maupun budaya.

Demokrasi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu bentuk pemerintahan *dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat* dimana otoritas tertinggi dipegang oleh rakyat. Keputusan yang menyangkut kemaslahatan umat dibuat atas dasar mayoritas.

Dalam sistem demokrasi ini masyarakat/rakyat diberi keluasaan untuk menyuarakan hak politik dengan bebas dan tanpa paksaan dari siapapun. Rakyat mempunyai hak

kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul, serta mendapatkan perlindungan yang sama dalam bidang hukum.

Pemerintahan demokrasi sangat menjunjung tinggi supremasi sipil, dimana pengendali roda pemerintahan adalah elit sipil yang dihasilkan dari pemilu yang demokratis. Supremasi sipil tidak akan pernah terwujud selama militer tetap mendominasi dan menjajah hak-hak sipil serta melakukan intervensi politik. Untuk itu peran-peran non-militer yang dijalankan militer harus segera diakhiri dengan demiliterisasi. Demiliterisasi bukan hanya agenda reformasi Indonesia, melainkan merupakan proyek besar bagi negara-negara dunia yang menghendaki supremasi sipil dan demokratisasi. Bahkan bagi negara-negara transisional pasca rezim otoritarian yang dipandegani militer, sebagaimana Indonesia, demiliterisasi menjadi agenda utamanya.

Supremasi sipil berarti menempatkan militer sebagai subordinatnya sipil. Dalam model supremasi sipil segala penentuan kebijakan dan pelaksanaan roda pemerintahan dikelola oleh sipil tanpa intervensi dari pihak militer. Termasuk kebijakan pertahanan dan keamanan militer hanya berhak memberikan masukan. Sedangkan penentu keputusannya tetap pemerintahan sipil dan militer harus melaksanakannya meskipun keputusan yang dihasilkan bertentangan dengan pendapatnya. Dalam hal ini militer hanya memainkan peran sebagai staf pemerintahan sipil. Supremasi sipil bukan berarti meremehkan peran militer. Sipil tetap menghargai dan menghormati profesionalitas militer dan tetap responsif dan respek terhadap keadaan militer. Meskipun sebagai penentu kebijakan sipil tidak berhak mencampuri kebijakan-kebijakan internal militer. Seperti kebijakan dalam

Intervensi militer dalam berbagai bidang inilah yang sering menimbulkan masalah ketika sipil mengambil pemerintahan. Militer yang sebelumnya mempunyai kekuasaan luas tidak akan menyerahkan begitu saja kekuasaannya kepada otoritas sipil. Akan tetapi, begitu besarnya peran militer di Indonesia sehingga istilah "intervensi" tampak teramat sederhana dan tidak dapat mencerminkan besarnya skala dan cakupan peran militer tersebut. Pada sisi lain, baik pada Orde Baru maupun Orde Lama, para politisi cenderung memanfaatkan militer untuk kepentingan politik. Untuk mendorong demokratisasi hubungan sipil-militer harus dirumuskan, artinya supremasi sipil ditegakkan. Akan tetapi kalangan sipil juga harus bertekad menghindari penggunaan militer untuk kepentingan politik.

Peran militer yang hegemonik ini pada akhirnya menumpulkan potensi kekuatan sipil yang otonom dan mandiri. Hal ini dikarenakan tindakan represif terhadap kekuatan/organisasi yang bersifat kritis terhadap kebijakan pemerintah. Organisasi yang kritis distigmakan sebagai PKI, berbuat makar, dan mengganggu stabilitas Negara.

Setidaknya terdapat tiga peran militer pada masa Orde Baru yang berakibat buruk bagi kehidupan demokrasi. *Pertama*, militer menempati jabatan-jabatan politis seperti menteri, gubernur, bupati, anggota Golkar, dan duduk mewakili dirinya di DPR. *Kedua*, militer menghegemoni kekuatan-kekuatan sipil. Sebagai contohnya adalah pada bulan Maret 1997, Kassospol ABRI Letjen Syarwan Hamid mengumpulkan guru besar dari seluruh Indonesia di Bogor untuk memberikan informasi mengenai bahaya Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan bangkitnya komunisme baru. PRD diasosiasikan oleh rezim militer sebagai metamorfosa dari PKI dan menjadi dalang dalam kerusuhan 27 Juli 1996. *Ketiga*, militer melakukan tindakan-tindakan represif terhadap rakyat. Ada serentetan

kasus yang melibatkan militer sebagai pelakunya, diantaranya adalah; pembunuhan terhadap ratusan ribu anggota PKI tanpa proses pengadilan di tahun 1966-1971, pembunuhan massal terhadap kelompok islam di Tanjung Priok pada tahun 1994, penculikan aktivis pro-demokrasi, dan masih banyak lagi serentetan peristiwa yang tidak terungkap.

Demiliterisasi atau penarikan diri dari panggung politik membuka peluang bagi kelahiran demokrasi dan kekuatan *civil (civil society)* yang kuat. Militer tidak lagi mempunyai peranan yang dominan dalam ranah politik, meski dalam beberapa hal masih menguasai sektor-sektor ekonomi-politik. Hal ini diakibatkan karena system politik tidak lagi otoriter dan kehidupan politik lebih demokratis dibanding dengan masa Orde Baru. Ruang demokrasi dibuka selebar-lebarnya tanpa adanya lagi tindakan represif dalam berorganisasi dan menyampaikan pendapat yang diatur dalam undang-undang. Dalam catatan Muhamad AS. Hikam (1996:206) disebutkan, menjamurnya partai politik, ormas, LSM yang semasa Orde Baru mencapai lebih dari 10.000-an terus meningkat seiring demokratisasi yang sedang berlangsung, pemilihan presiden secara langsung yang diikuti pemilihan kepala daerah menjadi satu indikator bagi perkembangan dan penguatan *civil society*.

Deskripsi diatas menunjukkan bagaimana dominannya peranan militer dalam ranah politik. Akibatnya, membawa Indonesia pada lumpur otoritarianisme. Demokrasi tidak berkembang secara maksimal, yang terjadi justru sebaliknya teror, intimidasi terhadap warga masyarakat dan organisasi yang berlawanan dengan pemerintah. *Civil society* menjadi tumbuh akibat dari represifnya pemerintah melalui kekuatan militer. *Civil society*

yang seharusnya menjadi awal kultur pengembangan demokrasi dan memelihara kultur demokratis tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena di atas, maka pokok permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana relasi demiliterisasi terhadap penguatan civil society pasca jatuhnya Orde Baru di Indonesia?

Kerangka Teori

Kerangka adalah garis besar suatu gejala atau kejadian yang akan dimuat dalam laporan lengkap dan resmi. Teori adalah sekumpulan gagasan, pendapat, asumsi, dan konsep disusun secara sistematis yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu fakta (peristiwa atau kejadian) dan disusun secara sistematis. Fransisco Budi Hardjiaman (2004:4) menyebutkan, teori berasal dari bahasa Yunani *theoria*, yakni tradisi keagamaan kebudayaan Yunani Kuno. Teori biasanya telah diuji kebenaran dan keahliannya.

Jadi, kerangka teori adalah dasar (acuan) pemikiran atau sekumpulan konsep untuk menggambarkan suatu peristiwa (kejadian). Kerangka teori menggambarkan serangkaian konsep menjadi satu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep itu berhubungan.

Menurut Koentjoroningrat (1991:11) teori merupakan pernyataan mengenai sebab akibat dan mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti dengan satu atau beberapa faktor tertentu.

Sedang Masri Singarimbun (1989:37) mendefinisikan teori sebagai serangkaian asumsi, konsep dan proposisi yang menerangkan suatu fenomena sosial sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep. Dengan kata lain teori adalah sarana untuk menyatukan hubungan sistematis antara fenomena sosial atau alam, dan dalam penelitian ini akan digunakan beberapa teori sebagai kerangka pemikiran, teori-teori tersebut adalah:

1. Militer dan Politik

Sepanjang 1950-an, militer umumnya dilihat sebagai kekuatan reaksioner, ekonomis konservatif, dan pendukung status quo, serta sepenuhnya tidak memiliki kompetensi dalam bidang teknis birokratis (Bienen 1983:3)

Pada Seminar Nasional "*Mencari Format Baru Hubungan Sipil-Militer Indonesia*" yang diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu Politik, FISIP UI, Depok, 25 Mei 1999, Mohtar Mas'ood menguraikan, militer adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentaraan atau kekuatan angkatan bersenjata suatu negara. Mas'ood menjelaskan bahwa, reformasi tentara demi demokratisasi mesti dimulai dengan pembahasan mengenai hak prerogatif yang dimiliki kaum militer selama ini. Secara umum, militer sebagai lembaga memiliki hak prerogatif yang bisa digolongkan ke dalam dua jenis: *Pertama*, yang berkaitan dengan kapasitas pimpinan tentara untuk

mempertahankan kendali atas keputusan yang berkaitan dengan organisasi internal (seperti, anggaran, penugasan, penetapan misi). *Kedua*, peran tentara dalam proses politik kenegaraan.

Seperti profesi dokter, pengacara dan lain sebagainya yang mempunyai tingkat spesialisasi yang berbeda, perwira modern adalah perwira yang profesional. Profesi sendiri penulis definisikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan dan keahlian tertentu. Keahlian dapat ini dapat diperoleh melalui pendidikan yang tinggi dan pengalaman. Menurut Harold Lasswell dalam Huntington (2003:8) keahlian utama militer adalah manajemen kekerasan. Fungsi kekuatan militer adalah keberhasilan dalam pertempuran senjata. Tugas perwira itu sendiri meliputi: 1. Pengaturan, perlengkapan, dan pelatihan angkatan bersenjata; 2. Perencanaan kegiatannya; 3. Pengarahan kegiatan operasinya di dalam dan di luar pertempuran.

Agar tercipta profesionalisme militer dibutuhkan kontrol sipil yang kuat. Hal ini berguna untuk meminimalisir kekuasaan militer yang dominan dalam ranah politik yang menjadi otoritas sipil.

Huntington juga menyebutkan bahwa, untuk meminimalkan kekuasaan militer secara umum ada dua jawaban besar. *Pertama*, Kontrol sipil secara subjektif, yakni dengan memaksimalkan kekuasaan sipil. Hal ini merupakan cara yang paling sederhana dalam meminimalkan kekuasaan militer dengan memaksimalkan kekuasaan kelompok sipil dalam hubungannya dengan militer. Dalam manifestasinya sepanjang sejarah, kontrol yang subjektif telah diidentifikasi dengan memaksimalkan kekuasaan institusi pemerintah tertentu, kelas-kelas sosial, dan bentuk-bentuk konstitusional tertentu. *Kedua*, kontrol sipil yang objektif yakni

dengan memaksimalakan profesionalisme militer. Lebih tepatnya adalah pembagian kekuasaan politik diantara militer dan kelompok-kelompok sipil untuk menciptakan situasi kondusif bagi munculnya sikap dan perilaku profesional diantara para anggota korp perwira.

Pemahaman tentang profesionalisme mungkin dapat dikelompokkan antara mereka yang menganut pengertian tradisional atau modernis. Kaum tradisional, yang sebagian besar berasal dari lingkungan kekuasaan, cenderung menafsirkan pemikiran-pemikiran yang pernah dikemukakan sebelumnya, khususnya bahwa "kemampuan segenap personil militer untuk mengamankan negara dan mencapai tujuan nasional. Mereka ingin mempertahankan keterlibatan militer dalam politik, termasuk dengan meningkatkan profesionalisme dalam bidang manajemen pemerintahan, ekonomi dan sosial. Kalangan modernis memberi dimensi yang lebih terbatas pada fungsi pertahanan, beranggapan bahwa keterlibatan dalam politik justru akan mengurangi profesionalisme militer.

Keterlibatan militer dalam politik sudah tua usianya, yakni sejak pengawal-pengawal pretorian kerajaan Roma yang dibentuk sebagai unit satu unit tentara khusus maharaja melakukan sebuah kudeta dan menguasai pemilihan pemilu. Pretorianisme yang dimaksud adalah sebuah situasi dimana tentara (angkatan bersenjata) tampil sebagai aktor politik utama yang sangat dominant yang secara langsung menggunakan kekuasaan mereka.

Di beberapa negara (terutama negara yang sedang berkembang) pengaruh angkatan bersenjata sangat luas. Angkatan bersenjata seringkali diindentikkan dengan lambang negara dan penahan utama bagi kemungkinan serangan terhadap negara

baik yang berasal dari luar ataupun dari dalam, di samping prestise, tanggung jawab dan sumber-sumber material yang diperlukan guna melaksanakan tugas tersebut. Keterlibatan mereka dalam ranah politik biasanya dengan mengandalkan kekuasaan mereka atas prajurit bersenjata, tank dan kapal terbang guna mempengaruhi keputusan pemerintahan ataupun menguasai pemerintahan sendiri.

Eric A. Nordlinger (1990:33-41) mengklasifikasikan campur tangan/intervensi militer dalam politik menjadi tiga macam. *Pertama* adalah moderator pretorian. Moderator praetorian menggunakan hak veto atas keputusan pemerintahan dan politik, tanpa menguasai pemerintahan itu sendiri. Walaupun pihak sipil yang memerintah, tetapi kekuasaan mereka diawasi oleh militer yang tidak akan menerima supremasi penuh pihak sipil. "Moderator" praetorian ini bertindak sebagai kelompok yang berpengaruh dan terlibata dalam politik. Dalam hubungan mereka dengan pemimpin sipil, kadangkala mereka mengancam akan melakukan kudeta. Jika perlu, mereka akan mengadakan satu kudeta penggantian dimana sebuah pemerintahan digulingkan dan digantikan oleh sekelompok orang sipil lainnya yang dapat dikuasai dan diterima oleh militer.

Kedua adalah pengawal pretorian. Setelah pengawal pretorian menggulingkan sebuah pemerintahan sipil, umumnya mereka sendiri akan memegang tampuk pemerintahan untuk periode hingga dua hingga empat tahun. Berhubungan dengan tujuan-tujuan pemerintah, mereka biasanya tidak berbeda dari moderator pretorian yang ingin menghalangi perubahan politik dan mempertahankan peraturan politik. Hanya pengawal pretorian yang merasa yakin bahwa sasaran tersebut lebih mudah

diapai apabila mereka sendiri yang memerintah.

pada umumnya agak enggan untuk menguasai pemerintahan itu sendiri. Pengawal preorian berbuat demikian sebagian disebabkan kepercayaan bahwa tidak ada pilihan lain karena tidak adanya satu golongan elit yang dapat mempertahankan status quo politik dan ekonomi, atau tanpa kudeta, kekuasaan akan berpindah ke tangan elit politik yang mempunyai tujuan yang berbeda dengan tujuan pihak militer.

Yang terakhir adalah penguasa pretorian. Penguasa pretorian ini jarang ditemukan bila dibanding dengan moderator pretorian dan pengawas pretorian. Diperkirakan, jumlah kasusnya tidak lebih dari 10 persen dari semua kasus campur tangan militer. Tetapi kekuasaan yang luas serta cita-cita politik dan ekonomi yang tinggi membuat mereka menjadi bagian penting dalam kajian mengenai pretorianisme ini. Kalau disbanding dengan rekan-rekan pengawas mereka, penguasa pretorian bukan saja menguasai pemerintahan, tetapi juga mendominasi rezim tersebut, dan kadang kala coba menguasai sebagaimana besar kehidupan politik ekonomi dan social melalau pembentukan struktur yang bermobilisasi. Tujuan dan ekonomi penguasa Pretoria adalah sangat tinggi, hingga kadangkala mereka menganggap dirinya sebagai golongan modernisasi yang radikal atau revolusioner.

Kusnanto Anggoro (1999:17-18) menjelaskan, dalam pengertian elit militer, demokratisasi itu tidak lebih dari segenap usaha untuk membangun sebuah usaha untuk membangun sebuah sistem "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Gagasan reformasi politik yang paling penting oleh karenanya adalah mengatur kembali hubungan antara "rakyat" (*the society*) dan "negara" (*the state*) dalam sebuah masyarakat negara, atau dalam istilah Aristotelian, *polity*. Dalam sistem demokrasi,

negara memberikan kepada rakyat perlindungan yang luas atas kebebasan individu

dan kelompok. Selain itu negara menjamin pluralisme menyeluruh bagi masyarakat sipil dan partai politik, menyelenggarakan peradilan yang bebas, dan menyediakan lembaga kontrol untuk akuntabilitas publiknya. Dalam hubungan itu harus ada ruang untuk membatasi kekuasaan negara, misalnya dengan perimbangan kekuasaan (*checks and balances*), antara lembaga-lembaga negara. Pada saat yang sama, hubungan itu juga menjamin hak-hak rakyat, baik partisipasi yang dilakukan melalui "masyarakat politik" (*political society*) maupun masyarakat madani (*civil society*).

2. Demiliterisasi

Demiliterisasi atau penarikan diri dari panggung politik dan sangat tergantung pada lamanya rezim berkuasa (rezim militer), tingkat keterlibatan militer dalam pemerintahan, kesolidan dan lain sebagainya.

Stepan (1988) dalam Talukder Maniruzzaman mengemukakan definisi tentang demiliterisasi yaitu : "*Military withdrawal from politics means the return of the intervening army to the military barrack with the military playing only the instrumental rule leaving the civilian political leadership in an unfettered position to determine political goals and make all decision and decesive consequence for the state*"

Menurut Ulf Sundhausen dalam Abdurahman Wahid, *et all* (1999) demiliterisasi dapat dilakukan di suatu negara maka terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan:

- a) Seluruh faksi dalam militer yang mampu melakukan aksi politik sepihak

senekat menyerahkan kekuasaan mereka kepada sipil. Didalam negara rezim

militer terdapat kecenderungan bahwa didalam institusi militer terjadi faksionalisme sehingga membagi militer menjadi faksi keras, faksi lunak, faksi moderat, faksi konvensional dan lain-lain. Salah satu syarat mutlak demiliterisasi adalah adanya kesatuan pendapat di dalam militer untuk menyerahkan kekuasaan kembali kepada sipil.

- b) Harus terjaminnya kepentingan-kepentingan yang dianggap pemimpin rezim militer sebagai hal yang esensial seperti otonomi militer, jaminan kesejahteraan dan terutama perlindungan secara fisik keselamatan pimpinan rezim.
- c) Rezim sipil pengganti harus menghindari pemotongan anggaran pertahanan secara drastis sebab jika hal ini dilakukan maka akan menyebabkan militer menganggap sipil telah berusaha menentang militer.
- d) Pimpinan militer melihat bahwa pemerintahan sipil yang ada merupakan alternatif politik yang dapat terus bertahan maksudnya adalah rezim militer harus diyakinkan bahwa keberadaan elit-elit sipil tidak hanya menyiapkan jaminan bagi kepentingan pribadi atau kelompoknya saja tetapi sipil harus kelihatan mampu menciptakan pemerintahan yang stabil.

Pembagian otonomi yang jelas tersebut merupakan produk tawar menawar militer akan bersedia untuk memberikan semua kekuasaan yang dimiliki dalam negara dengan imbalan sipil mau menjamin kepentingan militer

3. Civil Society

Hingga kini perdebatan mengenai *civil society* masih hangat diperdebatkan. Kebanyakan intelektual menngartikan *civil society* sebagai masyarakat sipil. Masyarakat *civil* yang dimaksud adalah masyarakat berperadaban. *Civi society* seringkali dipadankan atau disama-artikan dengan masyarakat madani.

Menurut T.A Legowo (1999:76) *civil society* merujuk sebenarnya pada sebuah *domain* interaksi sosial diantara *political society* dan *economic society*. Sebagai domain interaksi sosial, *civil society* tidak bertujuan menguasai dan mengontrol (*manage*) kekuasaan politik dan atau proses ekonomi yang secara berturut-turut menjadi *domain political society* dan *economic society*. Tetapi tidak berarti bahwa antara *civil society*, *political* dan *economic society* tidak ada hubungan sama sekali. Hubungan diantara mereka terletak pada peran *civil society* sebagai *pressure group* untuk mempengaruhi proses-proses politik dan ekonomi. Hubungan antara *civil society* dan *political* dan *economic society* bisa berlangsung antagonistik pada saat *political* dan *economic society* gagal memainkan peran dan fungsi mereka sebagai *mediating agents* dari *civil society* dalam proses-proses politik dan ekonomi. Kegagalan ini biasanya menarik *civil society* untuk terlibat langsung dalam proses-proses politik dan ekonomi.

Bagi Muhammad Wahyuning Nafis masyarakat sipil sebenarnya lebih tepat diartikan sebagai masyarakat berperadaban. Sebab kata *civil* (dari *civilization*) artinya peradaban – yang dalam bahasa Arab dinyatakan dengan katas-kata madaniyyah atau tamddun. Para sejarahwan sering mendefinisikan Negara “Madinah”-nya Nabi

'ciptaan' Nabi itu disebut demikian karena memiliki cirri-ciri, paling tidak, empat hal. *Pertama*, egalitarianis. Prinsip egalitarianisme adalah memandang derajat manusia sama. *Kedua*, pemberian penghargaan kepada seseorang berdasarkan prestasi, bukan prestise, semisal keturunan, kesukuan, ras dan yang sejenisnya. *Ketiga*, adanya keterbukaan untuk berpartisipasi bagi seluruh anggota masyarakat. Kondisi politik yang penuh keterbukaan ini juga sangat penting, karena dengan prinsip keterbukaan ini setiap warga Negara bisa urun rembuk, menyalurkan masing-masing aspirasinya kepada pihak penguasa yang menjadi wakilnya untuk membangun kehidupan bernegara yang lebih maju dan sejahtera. *Keempat*, penentuan kepemimpinan melalui pemilihan. Ciri keempat ini menjadi semacam dasar dari suatu masyarakat yang demokratis. Dengan sistem pemilihan ini, secara logis hanya orang yang pendukungnya lebih banyak yang bisa berhasil terpilih menjadi seorang pemimpin. (Republika, Sabtu, 15 Maret 1997)

Civil society menurut de'Tocqueville adalah wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain: kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya. Sebagai sebuah ruang politik, *civil society* adalah suatu wilayah adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkukukung kehidupan oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalamnya terdapat nantinya suatu ruang publik yang bebas (*the free public sphere*)

tempat dimana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat. (Moh. AS. Hikam;1996:3)

Menurut Esenatd dalam Lipset (1995:240), *civil society* adalah sebuah masyarakat (individual maupun kelompok) dalam negara, yang mampu berinteraksi dengan negara secara independen. Masyarakat yang dimaksud memiliki komponen tertentu sebagai syarat adanya *civil society*, yaitu otonomi, akses masyarakat terhadap lembaga negara, arena publik yang bersifat otonom, dan arena publik tersebut terbuka bagi semua lapisan masyarakat.

Menurut Mohtar Mas' oed ada tiga konsepsi tentang *civil society*. *Pertama*, Model Eropa Timur. Model ini menekankan bagaimana *civil society* menentang menentang Negara; paling tidak, berusaha membatasi aparat negara yang otoriter dan dominan. Jadi, *civil society* menentang Negara dan berusaha membuat Negara menjadi tidak relevan bagi kehidupan sehari-hari warga Negara.

Yang kedua adalah model Bank Dunia. Dalam model ini *civil society* berperan sebagai sarana untuk memangkas peran negara. *Civil society* yang berkembang harus mengambil alih beberapa peran social dan cultural negara, seperti perlindungan, dan pengembangan kehidupan beragama, kesenian, keluarga, dan pendidikan. Konsepsi *civil society* yang mengerjakan tugas yang tidak dikerjakan oleh pemerintah ini sesuai dengan gagasan neo-konservatif yang menolak demokrasi model sosial *welfare* (yang mengutamakan peran pemerintah) dan mendukung peran negara yang minimal. Lebih lanjut Mohtar mengatakan, *civil society* yang memperjuangkan minimalisasi peran

Ketiga adalah model Pluralis, yakni *civil society* sebagai sarana mengembangkan demokrasi dan memelihara kultur demokratik. *Civil society* merupakan inti kultur politik, yang esensial bagi sosialisasi warganegara. *Civil society* berperan sebagai sarana penjamin stabilitas demokrasi, pencegah dominasi satu kelompok terhadap yang lain, penggalang individu untuk bekerjasama. *Civil society* tidak berupaya menentang negara. Pengurangan peran Negara bukan tujuan utama. Yang pokok adalah membuat negara lebih bertanggungjawab secara demokratis kepada rakyatnya dan menggalakkan partisipasi masyarakat seluas mungkin dalam proses *governance*. *Civil society* tidak sama dengan dan tidak didominasi oleh kelas menengah. *Civil society* adalah fenomena pluralis, menggalakkan partisipasi oleh semua warga tanpa pandang ras, etnik, umur, gender, dan status ekonomi.

Ada beberapa syarat *civil society* dapat berkembang. *Civil society* hanya bisa berkembang jika memuat/komponen-komponen berikut:

- Otonom dari pengaruh negara
- Adanya akses bagi berbagai sector masyarakat ke dalam badan-badan penyelenggara negara dan komitmen mereka pada komunitas politik dan aturan main negara.
- Berkembangnya berbagai arena publik yang otonom dan yang didalamnya berbagai asosiasi bisa mengatur kegiatan mereka sendiri dan mengurus anggota mereka sendiri sehingga bisa mencegah agar masyarakat tidak menjadi massa

- Berbagi arena itu harus bisa dimasuki oleh semua warga negara dan terbuka untuk diperdebatkan, tidak terkukung dalam lingkungan yang eksklusif dan rahasia.

Lebih lanjut Mas' oed menyebutkan ada beberapa alasan mengapa menggalakkan *civil society*. *Pertama* berdasarkan kacamata pemerintah:

1. Pengembangan *nation-building*.

Argumen ini berdasar pada warga yang aktif melibatkan diri dalam komunitas dan ikut serta menangani isyu-isyu nasional bisa membangun ikatan-ikatan sesama warga dan kesetiaannya pada tanah air.

2. Membantu desentralisasi dan otonomi pemerintahan daerah

Desentralisasi fungsi-fungsi pemerintahan tertentu ke lembaga-lembaga tingkat daerah memerlukan 'civil society' yang aktif dan partisipatori. Penggalakan 'civil society' memungkinkan 'sense of self-governance' dan 'sense responsibility' yang lebih besar di pihak masyarakat. Yaitu warga setempat harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan isyu-isyu lokal dan membentuk komunitas lokal mereka sendiri.

3. Membantu penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, pendidikan, dan jasa lain.

Menolak gagasan negara kesejahteraan yang mengutamakan peran pemerintah. negara hanya menyediakan jaring-pengaman sosial minimal, dalam bentuk program kesejahteraan sosial, kesehatan, dan semacamnya. Ketika pemerintah mengundurkan diri dari berbagai kegiatan sosial itu, berbagai organisasi sosial sukarela (*lingkungan 'civil society'*) diharapkan

mengambil-alih peran tersebut. Misalnya, dalam hal pendidikan, masyarakat diharapkan memberi sumbangan lebih besar, antara lain privatisasi sekolah. Ringkasnya, 'civil society' berfungsi 'suplemenary', yaitu menggantikan fungsi negara.

Jadi, menurut pemerintah, 'civil society' merupakan sarana 'nation building' untuk membuat agar warga masyarakat mengambil tanggungjawab lebih besar dalam menangani persoalan lokal dan menyediakan layanan kesejahteraan sosial suplementer.

Yang kedua, berdasarkan kacamata aktivis non-pemerintah pejuang demokrasi:

1. Menanggapi tuntutan warga berpendidikan tinggi

Mengingat bahwa warga masyarakat semakin terdidik dan semakin banyak mengajukan tuntutan, pemerintah merasa perlu melakukan penyesuaian tanpa merubah system politik yang berlaku. Yaitu dengan melakukan konsultasi dan menyerukan 'civil society'. Penyesuaian ini lebih banyak dimaksud sebagai upaya memperoleh legitimasi melalui perbaikan proses pemerintahan ('legitimacy of process') untuk mendukung pencarian legitimasi melalui prestasi pembangunan ('political legitimacy based on performance'). Karena itu, penggalakan 'civil society', ini tidak akan banyak merubah keadaan.

2. Mengembangkan partisipasi dan memperkuat demokrasi

'Civil society' berfungsi mendukung demokrasi, bukan hanya untuk mendukung kaum elit, tetapi untuk segenap warganegara. 'Civil society' merupakan eksperimen untuk menciptakan hubungan antar-warga, sehingga masyarakat kembali merasa 'komunitas'. 'Civil society' merupakan

menyumbangkan gagasan dan usulan kebijakan. Para pemimpin Ornop menyatakan bahwa pemerintah tidak punya monopoli atas kebijaksanaan dan kearifan, karena itu partisipasi 'civil society' yang lebih besar akan memperbaiki mutu kebijakan public. Tetapi para pemimpin lain khawatir bahwa 'civil society' bisa menjadi sarana melemahkan oposisi politik, terutama melalui lembaga-lembaga non-partisan'.

Jadi, menurut para pemimpin organisasi non-pemerintah (Ornop), 'civil society' merupakan sarana untuk mengembangkan kultur politik demokratik yang lebih dewasa, dengan warganegara yang lebih aktif berpartisipasi, dengan pemerintah yang lebih banyak konsultasi dengan rakyat sebelum membuat keputusan, dan dengan proses 'governance' yang memiliki legitimasi lebih banyak.

Menurut Habermas dalam Bahtiar Alam kehidupan sosial terdiri dari dua dimensi, yaitu sistem dan *lifeworld*. *System* adalah wilayah kehidupan yang diintegrasikan oleh obyek tertentu, terdiri dari wilayah politik (*polity*) dan wilayah ekonomi (*economy*). Obyek yang mendorong tindakan-tindakan sosial di wilayah politik adalah kekuasaan (*power*), sedangkan di wilayah ekonomi adalah uang (*money*). Sebaliknya *civil society* merupakan bagian dari *lifeworld*, yaitu wilayah kehidupan di mana tindakan-tindakan sosial warganya tidak didorong oleh hasrat untuk mengakumulasi kekuasaan atau uang, tapi oleh nilai dasar yang muncul dalam kehidupan social seperti keadilan, kebenaran, kebaikan dan sebagainya. Di wilayah *lifeworld* inilah menurut Habermas tercipta suatu ruang publik (*public sphere*) di mana para warga dapat mengekspresikan nilai-nilai tersebut secara bebas melalui institusi social yang terbentuk, yaitu *civil society*.

Masalahnya adalah, walaupun *civil society* sebagai institusi dapat...

politik dan ekonomi, dia seringkali dipengaruhi oleh kedua system tersebut. Inilah yang dinamakan kolonisasi *civil society*, keadaan di mana vitalitas *civil society* digerogeti oleh system politik dan ekonomi. (Kompas, Sabtu, 20 Agustus 2005)

Menurut Ben Ager (2003:188-189) Habermas mengemukakan perubahan dari "paradigma kesadaran", yang menyetujui dualitas Barat atas subyek dan obyek, ke "paradigma komunikasi". Paradigma komunikasi ini mengkonseptualisasikan pengetahuan dan praktik bukan dalam hal dualitas antara subyek dan obyek-yang menurut Habermas hanya dapat dipecahkan melalui kesadaran idealis murni (terbang dari dunia) atau dengan dominasi-namun melalui satu rekonseptualisasi *subyek sebagai intersubjektif yang inheren*. Subyek intersubjektif memiliki kapasitas primer bagi komunikasi, bukan hanya kerja. Kalau kita kemabali ke kritik Habermas pada Marx, kita akan menemukan bahwa dia percaya hanya dengan refleksi diri dan komunikasi orang dapat benar-benar mengontrol nasib mereka dan merestrukturisasi masyarakat secara manusiawi.

Kusnato Anggoro (1999:21) menyebutkan, dalam sistem demokratik, masyarakat madani (*civil society*) memainkan peranan yang sama pentingnya dengan, dan tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh, masyarakat politik (*political society*). Istilah yang disebut belakangan, masyarakat politik, dimengerti sebagai arena perjuangan masyarakat untuk menyatakan dan memperjuangkan kepentingan itu melalui persaingan untuk menguasai kekuasaan pemerintah dan birokrasi Negara. masyarakat madani adalah arena berbagai gerakan sosial menyatakan kepentingan mereka tanpa keharusan untuk terlibat secara langsung dalam proses politik elektoral. Mereka yang terlibat dalam masyarakat ini adalah kelompok kepentingan. Lambang Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun

osiasi sosial berlandaskan pada kepentingan profesi, regionalis, kultural, dan sosial. Demokratisasi suatu tatanan sosial mempersyaratkan sistem berbangsa dan bernegara (polity) di mana pemerintah bergantung untuk mewujudkan kepentingan rakyat dengan membuka akuntabilitasnya terhadap kendali masyarakat politik maupun masyarakat madani. Rakyat mempunyai saluran untuk menyatakan pendapat dan kepentingannya melalui masyarakat madani maupun masyarakat politik. Dalam transisi demokrasi, masyarakat madani seringkali memainkan peranan penting untuk membangun kesadaran politik rakyat, termasuk kesadaran untuk mendukung rezim-rezim yang dihasilkan oleh pemerintah.

4. Hegemoni

Hegemoni negara membuat potensi dari *civil society* tidak berkembang. Melalui perangkat kebijakan, aturan dan norma, negara dengan kekuatan militer melakukan tindakan represif terhadap warganya. Melalui doktrin Dwifungsi ABRI (peran ganda), militer memasuki ranah ekonomi, sosial, politik, dan budaya menjadikan dirinya sebagai aktor yang dominan. Akibat peran yang dominan dan hegemonik dari militer dalam ranah politik ini mengakibatkan sistem bangunan organisasi politik yang otoriter-birokratik.

Dalam khasanah tradisi pemikiran Marxis, hegemoni bukanlah konsep yang baru, namun tetapi di tangan Gramsci-lah konsep ini di teorisasikan. Awal dari pemikirannya adalah kritik terhadap para penganut Marxisme ortodoks yang meyakini doktrin determinisme ekonomi. Konsep hegemoni sendiri sebenarnya dikenalkan oleh Lenin.

Muhadi Sugiono(1999:20) menyebutkan, bagi kaum Marxis Barat (Lucas, Sartre, dan Frankfort) kelengkapan mode analisis deterministik nampak sangat jelas ketika

crisis ekonomi datang dan pergi dalam perekonomian kapitalis tanpa mengakibatkan runtuhnya sistemikanya sebagaimana diyakini Marxisme Ortodok, determinisme ekonomi. Di mata Gramsci, agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Inilah yang dimaksud Gramsci dengan "hegemoni" atau menguasai dengan "kepemimpinan moral dan intelektual" secara konsensual. Dalam konteks ini, Gramsci secara berlawanan mendudukan hegemoni, sebagai bentuk supremasi satu kelompok atau beberapa kelompok atas lainnya, dengan bentuk supremasi lain yang ia namakan "dominasi", yaitu kekuasaan yang ditopang oleh kekuatan fisik.

. Definisi Konseptual

Definisi adalah kata, frase, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Definisi juga dapat diartikan sebagai rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi. Konsep adalah rancangan, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa kongkrit. Jadi, definisi konseptual adalah pengertian ide atau pengertian mengenai obyek kajian tertentu untuk menerangkan fakta atau kondisi obyektif.

Konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian. Kalau masalah teoritisnya sudah jelas, biasanya diketahui pada fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian dan suatu konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari

1. Militer

Militer adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentaraan atau kekuatan angkatan bersenjata suatu negara. Militer dalam bahasa Inggris "military" adalah "the soldiers, the army. The armed force" yang berarti dalam bahasa Indonesia adalah prajurit atau tentara. Militer merupakan penjaga keamanan terhadap ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar negeri.

2. Militerisme

Militerisme adalah paham yang berdasarkan kekuatan militer sebagai pendukung kekuasaan, pemerintahannya dikuasai oleh golongan militer, dan diatur secara militeristik. Rezim yang dikuasai oleh militer biasanya dalam mengelola konflik dengan menggunakan cara-cara kekerasan, tingkat disiplin yang kaku, dan lain sebagainya. Bentuk militerisme dalam prakteknya disebut militerisasi.

3. Militerisasi

Militerisasi adalah tumbuh dan berkembangnya militerisme dalam kehidupan sehari-hari. Watak yang menjadi karakter militer seperti kekerasan, penyeragaman, komodoisme dan lain sebagainya menjadi budaya masyarakat. Di Indonesia proses

4. Hegemoni Militer

Hegemoni militer adalah peran yang dominan militer dalam ranah politik. Militer menjadi aktor yang dominan dalam mempengaruhi kebijakan politik dalam tata pemerintahan di suatu Negara. Di Indonesia militer mendapat legitimasinya melalui ideologi "*Dwifungsi*" ABRI (sekarang TNI).

5. Demiliterisasi

Demiliterisasi adalah penarikan militer dari ranah politik dan mengembalikan posisinya sebagai penjaga keamanan dan pertahanan Negara dari ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Yakni suatu proses pembebasan dari ikatan atau dari sifat-sifat kemiliteran.

6. Supremasi sipil

Supremasi sipil adalah menempatkan militer dibawah kekuasaan sipil, segala penentuan kebijakan dan pelaksanaan roda pemerintahan dikelola oleh sipil tanpa ada intervensi pihak militer. Sederhananya, militer adalah subordinat sipil, militer berperan sebagai staf pemerintahan sipil. Dalam model Supremasi sipil, sipil harus tetap menghargai dan menghormati profesionalitas militer dan tidak berhak mencampuri kebijakan-kebijakan internal militer. Seperti kebijakan dalam hal

7. Demokrasi

Demokrasi adalah pemerintahan dari, untuk, dan oleh rakyat. Dimana rakyat berpartisipasi aktif dalam menentukan kehidupannya sendiri. Dalam Negara yang demokratis, nilai-nilai universalitas dan HAM dijunjung tinggi dan dijamin dalam undang-undang.

8. Demokratisasi

Demokratisasi adalah proses untuk mendemokratisasikan sistem politik yang dulunya otoriter menuju rezim yang partisipatoris.

9. Civil Society

Civil society adalah ruang kehidupan sosial yang terorganisasi secara rapi, suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkukung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap dalam jaringan politik resmi. *Civil society* mewujudkan dalam organisasi atau asosiasi yang dibuat oleh masyarakat bukan dibawah (tidak diintervensi) pengaruh negara., seperti LSM, organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban serta kelompok kepentingan (*interest group*) lainnya

Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu konsep dapat diukur.

Definisi operasional dalam penulisan ini mencakup beberapa indikator yang digunakan sebagai dasar pengukuran. Indikator tersebut digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui relasi demiliterisasi dan *civil society*. Indikator itu diantaranya adalah:

1. Militerisme

Bentuk-bentuk militerisme tertuang dalam militerisasi. Bentuk-bentuk itu diantaranya:

- a. Penguasaan sosial-ekonomi melalui pengadaan infrastruktur dan pengembangan teknologi.
- b. Pendekatan kekerasan dalam mengelola dan menyelesaikan konflik, bukan pendekatan yang sifatnya persuasif.
- c. Kekerasan ideologis yang sistematis (penyeragaman pola pikir). Misalnya melalui pendidikan, film dokumentasi dan lain sebagainya.

2. Demiliterisasi

Demiliterisasi memuat bergantung pada beberapa faktor, diantaranya adalah:

- a. Lamanya keterlibatan militer dalam politik (tingkat intervensi).
- b. Seberapa baik perlengkapan dan budget yang dimiliki.
- c. Seberapa jauh berhasil dilakukan profesionalisasi militer.

d. Seberapa jauh ...

- e. Seberapa solid, keterlibatan militer dalam kebijakan ekonomi dan sosial.

3. *Civil Society*/Masyarakat Madani

Faktor-faktor yang mendorong terwujudnya *civil society*:

- a. Kemudahan akses (adanya kebebasan pers) bagi berbagai sektor masyarakat ke dalam badan-badan penyelenggara Negara dan komitmen mereka pada komunitas politik dan aturan main Negara
- b. Berkembangnya berbagai arena publik yang otonom dan yang didalamnya berbagai asosiasi bisa mengatur kegiatan mereka sendiri dan mengurus anggota mereka sendiri
- c. Berbagai arena itu harus bisa dimasuki oleh semua warga Negara dan terbuka untuk diperdebatkan, tidak terkukung dalam lingkungan yang eksklusif dan rahasia.
- d. Terbentuknya kelas menengah yang kuat sebagai pelopornya.

4. Relasi demiliterisasi dan *civil society*

- a. Penjabaran dari demokratisasi

Kejatuhan dari suatu rezim yang otoriter akan melahirkan transisi demokrasi. Transisi adalah rentang waktu antara kejatuhan rezim yang dulunya otoriter menuju rezim yang demokratis. Biasanya negara otoriter selalu dipimpin oleh rezim militer dan menggunakan pendekatan yang militeristik untuk mengelola masyarakat dan negara. Salah satu aspek besar dari transisi demokrasi adalah pemembelian fungsi dan

peranan militer (pengembalian militer ke barak). Demiliterisasi berarti menyerahkan urusan politik kepada pemegang otoritas yakni sipil, dan menempatkan militer dibawah kendali militer atau subordinat sipil.

- b. Penjabaran pengembangan partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi. Akibat dari sistem otoriterian yang ditopang oleh kekuatan militer adalah represifitas dalam mengelola konflik yang berakibat pada melemahnya kekuatan *civil society*, dimana kekuatan politik yang kritis akan selalu direpresi oleh negara melalui kekuatan militer. Dalam situasi yang demokratis yang lepas dari kungkungan militer tingkat partisipasi masyarakat akan semakin menguat karena adanya kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berkumpul. Hal ini merupakan tahap awal menuju masyarakat madani atau *civil society* yang kuat dan mandiri.

F. Metode Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengidentifikasi relasi antara demiliterisasi dengan penguatan *civil society*.
- b. Mengkaji lebih mendalam kehidupan *civil society* di Indonesia sebagai

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif.

a. Penelitian Deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena-fenomena sosial tertentu.

Sedangkan ciri-ciri metode deskriptif adalah:

- Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan masalah-masalah yang aktual.
- Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian di analisa.

b. Penelitian eksploratif yaitu: metode penelitian yang berusaha mencari atau mengungkapkan hal-hal baru. Menurut Masri Singarimbun dan Soffian Effendi, Ciri-ciri penelitian eksploratif adalah penelitian penjajakan atau bersifat terbuka, masih mencari-cari, pengetahuan peneliti tentang masalah yang akan diteliti masih terlalu tipis untuk melakukan studi deskriptif.

c. Jenis penelitian Deskriptif Eksploratif adalah suatu penelitian yang mendapatkan data awal atau hal-hal baru yang masih samar-samar yang

3. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dengan metode dokumentasi. Sumber data tersebut meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah dan data dari internet yang sesuai dengan masalah yang dikaji.

4. Unit Analisa

Unit analisa dalam penelitian ini adalah ABRI/TNI, LSM, dan partai politik pada rezim Soekarno hingga Megawati untuk mengidentifikasi relasi demiliterisasi dengan *civil society*.

5. Teknik analisa data

Teknik kualitatif, yaitu dengan menganalisa permasalahan tanpa menggunakan data statistik atau matematis, serta dengan menggunakan *content analysis*, yaitu